

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 68 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 Oktober 2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN  
DAN PELAKSANAAN APBD**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium dan/atau belanja pegawai;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu; dan

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI**

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  
Honorarium diberikan kepada :
  - 1.1.1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - 1.1.2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - 1.1.3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
  - 1.1.4. Pembantu Bendahara Umum Daerah;
  - 1.1.5. Pengguna Anggaran (PA);
  - 1.1.6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - 1.1.7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - 1.1.8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
  - 1.1.9. Bendahara Pengeluaran;
  - 1.1.10. Bendahara Penerimaan;
  - 1.1.11. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - 1.1.12. Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
  - 1.1.13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD).

Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, PPKD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, PA/KPA, PPK-SKPD/PPKD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Penerimaan Pembantu dan PPK-Unit SKPD dibayarkan maksimal 12 bulan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD berkenaan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  - 1) Jumlah PPK-SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Honorarium diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang diberi tugas untuk menginformasikan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

1.5 Honorarium Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/aparat keamanan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pengadaan barang dan jasa dan berlaku untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dibayarkan maksimum 8 hari.

1.6 Honorarium Petugas Piket/Jaga

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/Aparat Keamanan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan dalam suatu acara, kegiatan dan tempat-tempat tertentu antara lain untuk menjaga tempat/posko, gedung kantor, rumah jabatan dan obyek vital lainnya.

1.7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.7.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 1.7.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.7.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.7.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang dan/atau sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- 1.8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana,



dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan  | Klasifikasi |    |     |
|----|--|-------------|----|-----|
|    |  | I           | II | III |
| 1  | Pejabat Eselon I dan Eselon II                       | 2           | 3  | 4   |
| 2  | Pejabat Eselon III                                   | 3           | 4  | 5   |
| 3  | Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.8.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
  - dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan/atau antar satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
  - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

#### 1.8.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 1.8.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. diatas dikecualikan untuk Honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang memerlukan Tim pelaksana kegiatan yang relatif banyak berdasarkan pertimbangan urgensi dan efektivitas suatu kegiatan antara lain Penerimaan CPNS/PPPK, penyelenggaraan kegiatan Diklat, kegiatan hari-hari besar Nasional, Tim penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

#### 1.9. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### 1.9.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 1.9.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparaturn sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### 1.10. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

#### 1.11. Honorarium Rohaniwan

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam kegiatan resmi pemerintah sebagai pembaca doa, pengambilan sumpah dan pengukuh sumpah jabatan.

#### 1.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

##### 1.12.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.



#### 1.12.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### 1.12.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.13. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 1.14. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

#### 1.15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

##### 1.15.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 1.15.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.15.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.15.4. Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat.  
Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat diberikan kepada PNS/TNI/Polri dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan bagi peserta Diklat dan peserta Pelatihan Dasar CPNS dalam bentuk kegiatan penguatan jasmani, rohani dan spiritual.
- 1.15.5. Honorarium Petugas Pengamat Kelas/Notulis.  
Honorarium Petugas Pengamat Kelas / Notulis diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Pejabat yang berwenang untuk membuat catatan seminar/rancangan proyek perubahan / rancangan aktualisasi / laboratorium kepemimpinan/aktualisasi peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
- 1.15.6. Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.  
Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk mengawasi dan menilai pada saat penyelenggaraan dan/atau pasca Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.
- 1.15.7. Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking.  
Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang berasal dari lokus visitasi/benchmarking yang bertugas mendampingi rombongan selama kegiatan visitasi/benchmarking.
- 1.15.8. Honorarium Fasilitator Benchmarking.  
Honorarium Fasilitator Benchmarking diberikan kepada PNS/pejabat daerah setempat dari lokus visitasi/benchmarking yang menerima/menyambut rombongan benchmarking.
- 1.15.9. Honorarium Petugas Keamanan.  
Honorarium Petugas Keamanan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk menjaga keamanan di lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
- 1.15.10. Honorarium Petugas Kebersihan.  
Honorarium Petugas Kebersihan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan di



lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat  
Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.

1.15.11. Honorarium Petugas Kesehatan.

Honorarium Petugas Kesehatan / Tenaga Medis diberikan kepada PNS/Non PNS yang memiliki keahlian dibidangnya dan ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan layanan kesehatan bagi penyelenggara dan peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.

1.15.12. Honorarium Tim Supervisor/Assesor Penyelenggaraan Diklat.

Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Pejabatian diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk menilai kelayakan fasilitas/sarana prasarana/ kompetensi penyelenggara Diklat dan menerbitkan izin penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.

1.15.13. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.15.14. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri dari TAPD dan Sekretariat TAPD dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Sekretariat TAPD terdiri dari Sekretariat TAPD Bidang Perencanaan dan Sekretariat TAPD Bidang Keuangan jumlah keanggotaan masing-masing

disesuaikan dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

- 1.17. **Honorarium Tim Asistensi Dan Evaluasi DPA/DPPA SKPD**  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi DPA/DPPA SKPD diberikan kepada Tim Inti dan Pelaksana Teknis yang diberi tugas untuk melakukan asistensi dan mengevaluasi serta menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- 1.18. **Honorarium Tim Asistensi Dan Evaluasi RKA/RKAP SKPD**  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi RKA/RKAP SKPD diberikan kepada Tim Pelaksana Teknis yang diberi tugas untuk melakukan asistensi dan mengevaluasi serta menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- 1.19. **Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah**  
Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah diberikan kepada Tim dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati guna melakukan tugas reviu dokumen perencanaan dan penganggaran guna menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
- 1.20. **Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi Renja SKPD**  
Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi Renja SKPD diberikan kepada Tim Perencanaan Daerah untuk melakukan asistensi dan evaluasi Renja SKPD guna menjamin konsistensi dan keterpaduan antara RPJMD, RKPD KUA dan PPAS baik murni maupun perubahan yang penugasannya ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- 1.21. **Honorarium Tim Pengkaji Peraturan Daerah**  
Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Daerah yang dibuat oleh SKPD pemrakarsa dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- 1.22. **Honorarium Tim Pengkaji Peraturan Bupati/Keputusan Bupati**  
Honorarium Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dibuat oleh SKPD pemrakarsa dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- 1.23. **Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**  
Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditetapkan sebagai Administrator dan Operator untuk melakukan tugas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sepanjang tidak duplikasi dengan pemberian honorarium sejenisnya akibat perangkapan tugas sebagai Administrator dan Operator aplikasi/sistem lainnya.  
Aplikasi SIPD yang dimaksud disini adalah sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya.  
Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola SIPD adalah sebagai berikut :
  - a. Administrator Daerah, Administrator TAPD dan Operator Daerah;
  - b. Administrator dan Operator pada Organisasi Perangkat Daerah.



Penunjukkan/penetapan Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selain Honorarium Pengelola Aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan honorarium kepada pengelola aplikasi lain selain SIPD antara lain aplikasi SIMDA keuangan daerah, sistem penatausahaan aset daerah, sistem pengelolaan pendapatan daerah, sistem Informasi Gaji PNS Daerah, Sistem informasi data kepegawaian daerah, sistem informasi data kependudukan dan aplikasi sejenis lainnya yang diterapkan di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola sistem aplikasi selain SIPD adalah sebagai berikut :

- a. Honorarium Administrator Daerah/server, Administrator Daerah/server dan Operator Daerah/server, diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk mengelola database website/server, terdiri dari 1 (satu) orang Administrator Daerah/server, 3 (tiga) orang Administrator Daerah/server dan paling banyak 6 (enam) orang Operator Daerah/server;
- b. Honorarium Administrator dan Operator OPD diberikan kepada PNS/Non PNS pada OPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala OPD/Pengguna Anggaran untuk mengelola database klien di OPD masing-masing terdiri dari untuk 1 (satu) orang Administrator dan 1 (satu) orang Operator.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan dan cakupan pelayanan, Pengguna Anggaran SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis dapat menetapkan Operator paling banyak 3 (tiga) orang.

#### 1.24. Honorarium Instruktur

Honorarium Instruktur diberikan kepada PNS atau Non PNS yang ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan perjam pelajaran sesuai dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan.

#### 1.25. Honorarium Tenaga Ahli Dengan Perjanjian Kerja

Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.

#### 1.26. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Non PNS atau Non PPPK atau saat ini disebut dengan pegawai honorer/Tenaga kontrak/tenaga harian lepas yang bertugas sebagai penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan honorarium diberikan sesuai dengan tingkatan pendidikan dan masa kerja terhitung sejak Surat Keputusan Pejabat yang berwenang atau perjanjian/perikatan/kontrak Kerja pertama diterbitkan dan dibayar maksimal sebesar yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### 1.27. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural

Biaya Diklat Kepemimpinan merupakan suatu biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat PNS yang akan/telah menduduki jabatan tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya penyelenggaraan (kontribusi), biaya studi lapangan/benchmarking, uang saku dan sudah termasuk perjalanan dinas peserta. Oleh karenanya peserta diklat tidak dapat

diberikan biaya lain-lain yang bersumber dari APBD selama mengikuti kegiatan diklat dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.

1.28. Satuan Biaya Diklat LEMHANAS

Satuan biaya diklat LEMHANAS digunakan untuk biaya kontribusi, uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program pulang-pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.

1.29. Satuan Biaya Diklat Calon Camat

Biaya Diklat Calon Camat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan diklat bagi Camat yang bukan berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan. Satuan biaya diklat ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), uang saku, biaya penulisan laporan, biaya kelengkapan diklat/buku referensi, biaya pakaian diklat, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya studi lapangan, biaya praktek kerja lapangan, bantuan transportasi pulang-pergi (PP) dan transportasi lokal. Oleh karenanya biaya-biaya lain yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan kepada peserta diklat.

1.30. Satuan Biaya Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar CPNS

Satuan biaya diklat prajabatan CPNS adalah satuan biaya penyelenggaraan diklat bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau kategori II dan Non Honorer yang diangkat melalui pengangkatan khusus sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat dan uang saku peserta.

Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan Dasar bagi CPNS yang diangkat melalui rekrutmen CPNS sistem CAT sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS yang harus diikuti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi CPNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), dan uang saku peserta. Besaran biaya yang diberikan merupakan nilai maksimal dan dapat diberikan sesuai kemampuan APBD tahun berjalan. Besaran biaya pelatihan dimaksud dibagi berdasarkan tempat pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS oleh BPSPDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelatihan dasar.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan tarif biaya, standar biaya untuk kegiatan diklat prajabatan dan pelatihan dasar dapat mengacu kepada tarif/satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat terakreditasi selaku penyelenggara.

1.31. Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset berdasarkan rincian biaya anggaran penelitian yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/kampus/ universitas berkenaan.



1.32. Bantuan Izin Belajar  
Bantuan izin belajar bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada PNS yang memperoleh izin belajar, namun bantuan ini dapat diberikan kepada PNS yang bersangkutan sepanjang dana tersedia serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.33. Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur  
Diberikan dengan ketentuan sbb:

- a. Lembur diluar jam kerja minimal 2 (dua) jam dalam sehari.
- b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.
- c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawai termasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur minimal tiga jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari.  
Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala SKPD.

1.34. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan  
Satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack/kudapan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

1.35. Honorarium Pengelola Arsip  
Honorarium Pengelola Arsip SKPD diberikan kepada PNS atau Non PNS dan dibayarkan kepada satu orang pengelola arsip yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran honorarium maksimal 12 bulan.

1.36. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah  
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah :

1. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah I
2. Wakil Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah II
3. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah
4. Pejabat Penatausahaan barang milik daerah adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
5. Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
6. Pembantu pengurus barang pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang.

Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.

1.37. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah.

- Besaran Honorarium pada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dibayarkan berdasarkan akumulasi nilai aset tetap yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- Pengguna Barang adalah Kepala SKPD sebagai Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Puskesmas/Kepala Bagian/Kepala Bidang atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Sekretaris SKPD /Kepala Sub Bagian Aset/Kepala Sub Bagian Umum yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna barang (SKPD).
- Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
- Pembantu pengurus barang pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.
- Pengurus barang pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.

Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.

*Dalam hal beban kerja Penanggung jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka honorarium dimaksud tidak dapat dibayarkan.*

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

| NO     | URAIAN  | SATUAN | BESARAN   |
|--------|---|--------|-----------|
| (1)    | (2)   | (3)    | (4)       |
| 1.1.   | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN                            |        |           |
| 1.1.1. | Koordinator Pengelola Keuangan  | OB     | 3.840.000 |
| 1.1.2. | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) | OB     | 3.456.000 |
| 1.1.3. | Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)                                   | OB     | 3.072.000 |
| 1.1.4. | Pembantu Bendahara Umum Daerah  | OB     | 2.304.000 |
| 1.1.5. | Pengguna Anggaran   |        |           |
|        | a. Nilai pagu dana s.d.100 juta   | OB     | 656.000   |
|        | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                         | OB     | 800.000   |
|        | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                         | OB     | 945.000   |
|        | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                         | OB     | 1.089.000 |
|        | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                       | OB     | 1.273.000 |
|        | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                       | OB     | 1.456.000 |
|        | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                        | OB     | 1.640.000 |
|        | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                       | OB     | 2.073.000 |
|        | i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar s.d.100 milyar                       | OB     | 2.935.000 |
|        | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                     | OB     | 4.042.000 |
| 1.1.6. | Kuasa Pengguna Anggaran   |        |           |
|        | a. Nilai pagu dana s.d.100 juta   | OB     | 630.000   |
|        | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                         | OB     | 756.000   |
|        | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                         | OB     | 882.000   |
|        | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                         | OB     | 1.008.000 |
|        | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                       | OB     | 1.197.000 |
|        | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                       | OB     | 1.386.000 |
|        | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                        | OB     | 1.575.000 |
|        | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                       | OB     | 1.953.000 |
|        | i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar s.d.100 milyar                       | OB     | 2.835.000 |
|        | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                     | OB     | 3.843.000 |
| 1.1.7. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                  |        |           |
|        | a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta  | OB     | 403.000   |



|         |   |    |           |
|---------|---|----|-----------|
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                       | OB | 495.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                       | OB | 588.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                       | OB | 672.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                     | OB | 789.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                     | OB | 898.000   |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                      | OB | 1.016.000 |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                     | OB | 1.285.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar                    | OB | 1.822.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                   | OB | 2.503.000 |
| 1.1.8.  | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta  | OB | 400.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                       | OB | 480.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                       | OB | 570.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                       | OB | 660.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                     | OB | 770.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                     | OB | 880.000   |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                      | OB | 990.000   |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                     | OB | 1.250.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar                    | OB | 1.520.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                   | OB | 1.780.000 |
| 1.1.9.  | Bendahara Pengeluaran   |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta  | OB | 340.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                       | OB | 420.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                       | OB | 500.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                       | OB | 570.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                     | OB | 670.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                     | OB | 770.000   |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                      | OB | 860.000   |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                     | OB | 1.320.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar                    | OB | 1.780.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                   | OB | 2.120.000 |
| 1.1.10. | Bendahara Penerimaan  |    |           |
|         | a. Nilai penerimaan per tahun s.d. 5 juta                               | OB | 214.000   |
|         | b. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 juta s.d. 10 juta               | OB | 249.000   |
|         | c. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 juta s.d. 30 juta              | OB | 285.000   |
|         | d. Nilai penerimaan per tahun di atas 30 juta s.d. 50 juta              | OB | 321.000   |
|         | e. Nilai penerimaan per tahun di atas 50 juta s.d. 100 juta             | OB | 340.000   |
|         | f. Nilai penerimaan per tahun di atas 100 juta s.d. 200 juta            | OB | 420.000   |
|         | g. Nilai penerimaan per tahun di atas 200 juta s.d. 500 juta            | OB | 500.000   |
|         | h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta s.d. 1 miliar            | OB | 570.000   |
|         | i. Nilai penerimaan per tahun di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar          | OB | 670.000   |
|         | j. Nilai penerimaan per tahun di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar          | OB | 770.000   |
|         | k. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 miliar s.d. 10 miliar           | OB | 860.000   |
|         | l. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 miliar                         | OB | 1.090.000 |
| 1.1.11. | Bendahara Pengeluaran Pembantu  |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta  | OB | 260.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta                       | OB | 310.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta                       | OB | 370.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar                       | OB | 430.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar                     | OB | 500.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar                     | OB | 570.000   |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar                      | OB | 640.000   |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar                     | OB | 980.000   |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar                    | OB | 1.330.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar                                   | OB | 1.580.000 |

|         |  |    |           |
|---------|--|----|-----------|
| 1.1.12. | Bendahara Penerimaan Pembantu  |    |           |
|         | a. Nilai penerimaan per tahun s.d. 5 juta  | OB | 142.000   |
|         | b. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 juta s.d. 10 juta  | OB | 178.000   |
|         | c. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 juta s.d. 30 juta   | OB | 214.000   |
|         | d. Nilai penerimaan per tahun di atas 30 juta s.d. 50 juta   | OB | 249.000   |
|         | e. Nilai penerimaan per tahun di atas 50 juta s.d. 100 juta  | OB | 260.000   |
|         | f. Nilai penerimaan per tahun di atas 100 juta s.d. 200 juta   | OB | 310.000   |
|         | g. Nilai penerimaan per tahun di atas 200 juta s.d. 500 juta   | OB | 370.000   |
|         | h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta s.d. 1 miliar   | OB | 430.000   |
|         | i. Nilai penerimaan per tahun di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar   | OB | 500.000   |
|         | j. Nilai penerimaan per tahun di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar   | OB | 570.000   |
| 1.1.13. | Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD   |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta   | OB | 357.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta  | OB | 428.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta  | OB | 508.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar  | OB | 589.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar  | OB | 686.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar  | OB | 785.000   |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar   | OB | 883.000   |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar  | OB | 1.115.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar   | OB | 1.356.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar  | OB | 1.820.000 |
| 1.2.    | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA   |    |           |
| 1.2.1.  | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa   | OB | 680.000   |
| 1.2.2.  | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  |    |           |
| 1.2.2.1 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)   |    |           |
|         | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta   | OP | 680.000   |
|         | b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta  | OP | 850.000   |
|         | c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar  | OP | 1.020.000 |
|         | d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar  | OP | 1.270.000 |
|         | e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar  | OP | 1.520.000 |
|         | f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar   | OP | 1.780.000 |
|         | g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar  | OP | 2.120.000 |
|         | h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar  | OP | 2.450.000 |
|         | i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar  | OP | 2.790.000 |
|         | j. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar   | OP | 3.130.000 |
| 1.2.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)              |    |           |
|         | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta   | OP | 760.000   |
|         | b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta  | OP | 760.000   |
|         | c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar  | OP | 920.000   |
|         | d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar  | OP | 1.140.000 |
|         | e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar  | OP | 1.370.000 |
|         | f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar   | OP | 1.600.000 |
|         | g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar  | OP | 1.910.000 |
|         | h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar  | OP | 2.210.000 |
|         | i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar  | OP | 2.520.000 |
|         | j. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar   | OP | 2.820.000 |
| 1.2.2.3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) |    |           |
|         | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 juta   | OP | 400.000   |
|         | b. Nilai pagu pengadaan diatas 100 juta s.d. 250 juta  | OP | 420.000   |
|         | c. Nilai pagu pengadaan diatas 250 juta s.d. 500 juta  | OP | 440.000   |
|         | d. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 miliar  | OP | 460.000   |
|         | e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar  | OP | 480.000   |
|         | f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar  | OP | 600.000   |
|         | g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 miliar s.d. 10 miliar   | OP | 720.000   |



|         |  |    |           |
|---------|--|----|-----------|
|         | h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 miliar s.d. 25 miliar  | OP | 910.000   |
|         | i. Nilai pagu pengadaan diatas 25 miliar s.d. 50 miliar  | OP | 1.090.000 |
|         | j. Nilai pagu pengadaan diatas 50 miliar s.d. 75 miliar  | OP | 1.270.000 |
|         | k. Nilai pagu pengadaan diatas 75 miliar s.d. 100 miliar   | OP | 1.510.000 |
|         |  |    |           |
| 1.2.3   | Honorarium Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen   |    |           |
| 1.2.3.1 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)  |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d 100 juta  | OP | 630.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta   | OP | 756.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta   | OP | 882.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar   | OP | 1.008.000 |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar   | OP | 1.197.000 |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar   | OP | 1.386.000 |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar  | OP | 1.575.000 |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar   | OP | 1.953.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar  | OP | 2.835.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar  | OP | 3.580.000 |
|         |  |    |           |
| 1.2.3.2 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)   |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d 100 juta  | OP | 567.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta   | OP | 680.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta   | OP | 793.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar   | OP | 907.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar   | OP | 1.077.000 |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar   | OP | 1.247.000 |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar  | OP | 1.417.000 |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar   | OP | 1.757.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar  | OP | 2.551.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar  | OP | 3.230.000 |
|         |  |    |           |
| 1.2.3.3 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)   |    |           |
|         | a. Nilai pagu dana s.d 100 juta  | OP | 504.000   |
|         | b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d.250 juta   | OP | 604.000   |
|         | c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d.500 juta   | OP | 705.000   |
|         | d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d.1 Miliar   | OP | 806.000   |
|         | e. Nilai pagu dana di atas 1 Miliar s.d.2,5 Miliar   | OP | 957.000   |
|         | f. Nilai pagu dana di atas 2,5 Miliar s.d.5 Miliar   | OP | 1.108.000 |
|         | g. Nilai pagu dana di atas 5 Miliar s.d.10 Miliar  | OP | 1.260.000 |
|         | h. Nilai pagu dana di atas 10 Miliar s.d.50 Miliar   | OP | 1.562.000 |
|         | i. Nilai pagu dana di atas 50 Miliar s.d.100 Miliar  | OP | 2.110.000 |
|         | j. Nilai pagu dana di atas 100 Miliar  | OP | 2.560.000 |
|         |  |    |           |
| 1.2.4   | Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa                            |    |           |
|         | a. Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa  | OB | 420.000   |
|         | b. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan 10 juta                     | OP |           |
|         | - Ketua  |    | 280.000   |
|         | - Sekretaris   |    | 210.000   |
|         | - Anggota  |    | 126.000   |
|         | c. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasadengan nilai diatas 10 juta s.d. 50 juta   | OP |           |
|         | - Ketua  |    | 336.000   |
|         | - Sekretaris   |    | 252.000   |
|         | - Anggota  |    | 268.000   |
|         | d. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50 juta s.d. 100 juta | OP |           |

|     |   |            |           |
|-----|---|------------|-----------|
|     | - Ketua   |            | 378.000   |
|     | - Sekretaris  |            | 294.000   |
|     | - Anggota   |            | 210.000   |
|     | e. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 100 juta s.d. 250 juta | OP         |           |
|     | - Ketua   |            | 420.000   |
|     | - Sekretaris  |            | 336.000   |
|     | - Anggota   |            | 252.000   |
|     | f. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 250 juta s.d. 500 juta | OP         |           |
|     | - Ketua   |            | 520.000   |
|     | - Sekretaris  |            | 420.000   |
|     | - Anggota   |            | 315.000   |
|     | g. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 500 juta s.d. 1 Miliar | OP         |           |
|     | - Ketua   |            | 620.000   |
|     | - Sekretaris  |            | 504.000   |
|     | - Anggota   |            | 378.000   |
|     | h. Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasadengan nilai diatas 1                       | OP         |           |
|     | - Ketua   |            | 770.000   |
|     | - Sekretaris  |            | 630.000   |
|     | - Anggota   |            | 472.000   |
| 1.3 | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)   |            |           |
|     | a. Kepala   | OB         | 1.000.000 |
|     | b. Sekretaris/Staf Pendukung  | OB         | 750.000   |
| 1.4 | HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)   |            |           |
|     | a. Ketua  | OB         | 800.000   |
|     | b. Sekretaris   | OB         | 750.000   |
|     | c. Koordinator  | OB         | 600.000   |
|     | d. Anggota  | OB         | 550.000   |
| 1.5 | HONORARIUM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA   | OJ         | 20.000    |
| 1.6 | HONORARIUM PETUGAS PIKET/JAGA   | OJ         | 15.000    |
| 1.7 | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA  |            |           |
|     | 1.7.1. Honorarium Narasumber/Pembahas   |            |           |
|     | a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya   | OJ         | 1.700.000 |
|     | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan                       | OJ         | 1.400.000 |
|     | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan   | OJ         | 1.200.000 |
|     | d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan  | OJ         | 1.000.000 |
|     | e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan  | OJ         | 900.000   |
|     | 1.7.2. Honorarium Moderator   | Orang/Kali | 700.000   |
|     | 1.7.3. Honorarium Pembawa Acara   | OK         | 400.000   |
|     | 1.7.4. Honorarium Panitia   |            |           |
|     | 1) Penanggung jawab   | OK         | 450.000   |
|     | 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK         | 400.000   |
|     | 3) Sekretaris   | OK         | 300.000   |
|     | 4) Anggota  | OK         | 300.000   |



|         |  |                |           |
|---------|--|----------------|-----------|
| 1.8     | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN                         |                |           |
| 1.8.1.  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                |           |
| 1.8.1.1 | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah   |                |           |
|         | a. Pengarah  | OK             | 1.500.000 |
|         | b. Penanggung jawab  | OK             | 1.250.000 |
|         | c. Ketua   | OK             | 1.000.000 |
|         | d. Wakil Ketua   | OK             | 850.000   |
|         | e. Sekretaris  | OK             | 750.000   |
|         | f. Anggota   | OK             | 725.000   |
| 1.8.1.2 | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah   |                |           |
|         | a. Pengarah  | OK             | 750.000   |
|         | b. Penanggung jawab  | OK             | 700.000   |
|         | c. Ketua   | OK             | 650.000   |
|         | d. Wakil Ketua   | OK             | 600.000   |
|         | e. Sekretaris  | OK             | 500.000   |
|         | f. Anggota   | OK             | 450.000   |
| 1.8.2.  | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  |                |           |
| 1.8.2.1 | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah   |                |           |
|         | a. Ketua/Wakil Ketua   | OK             | 250.000   |
|         | b. Anggota   | OK             | 220.000   |
| 1.9     | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA                                      |                |           |
| 1.9.1.  | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli  | Orang/<br>Kali | 1.800.000 |
| 1.9.2.  | Honorarium Beracara  | Orang/<br>Kali | 1.800.000 |
| 1.10    | HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN  |                |           |
| 1.10.1. | SLTA   | OB             | 1.350.000 |
| 1.10.2. | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan  | OB             | 1.600.000 |
| 1.10.3. | Sarjana (S1)   | OB             | 1.875.000 |
| 1.10.4. | Master (S2)  | OB             | 2.200.000 |
| 1.10.5. | Doktor (S3)  | OB             | 3.000.000 |
| 1.11    | HONORARIUM ROHAHIWAN   |                |           |
| 1.11.1. | ROHANIWAN PEMBACA DOA  | OK             | 400.000   |
| 1.11.2. | ROHANIWAN PENGAMBIL SUMPAH   | OK             | 600.000   |
| 1.11.3. | PENGUKUH SUMPAH  | OK             | 1.000.000 |
| 1.12    | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE |                |           |
| 1.12.1. | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal   |                |           |
|         | a. Penanggung jawab  | OB             | 500.000   |
|         | b. Redaktur  | OB             | 400.000   |
|         | c. Penyunting/Editor   | OB             | 300.000   |
|         | d. Desain Grafis   | OB             | 180.000   |
|         | e. Fotografer  | OB             | 180.000   |
|         | f. Sekretariat   | OB             | 150.000   |
|         | g. Pembuat Artikel   | Per<br>Liputan | 200.000   |
| 1.12.2. | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah  |                |           |
|         | a. Penanggung jawab  | OB             | 400.000   |
|         | b. Redaktur  | OB             | 300.000   |
|         | c. Penyunting/Editor   | OB             | 250.000   |
|         | d. Desain Grafis   | OB             | 180.000   |

|  |   |             |           |
|--|---|-------------|-----------|
|  | e. Fotografer   | OB          | 180.000   |
|  | f. Sekretariat  | OB          | 150.000   |
|  | g. Pembuat Artikel  | Per Liputan | 100.000   |
|  |   |             |           |
|  | 1.12.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website                               |             |           |
|  | a. Penanggung jawab   | OB          | 250.000   |
|  | b. Redaktur   | OB          | 225.000   |
|  | c. Editor   | OB          | 200.000   |
|  | d. Web Admin  | OB          | 175.000   |
|  | e. Web Developer  | OB          | 150.000   |
|  | f. Web Operator   | OB          | 100.000   |
|  | g. Pembuat Artikel  | Per Liputan | 50.000    |
|  |   |             |           |
|  | 1.13 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN   |             |           |
|  | 1.13.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar                                       |             |           |
|  | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian  | Materi      | 150.000   |
|  | b. Pengawas Ujian   | OH          | 225.000   |
|  | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa       | 3.500     |
|  |   |             |           |
|  | 1.13.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah                                    |             |           |
|  | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian  | Materi      | 160.000   |
|  | b. Pengawas Ujian   | OH          | 240.000   |
|  | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa       | 4.500     |
|  |   |             |           |
|  | 1.14 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA                                |             |           |
|  | 1.14.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota                            | Materi      | 100.000   |
|  | 1.14.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota                                |             |           |
|  | a. Telaah Materi Soal   | Materi      | 45.000    |
|  | b. Telaah Bahasa Soal   | Materi      | 20.000    |
|  |   |             |           |
|  | 1.15 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)                            |             |           |
|  | 1.15.1. Honorarium Penceramah   | OJP         | 1.000.000 |
|  | 1.15.2. Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara  | OJP         | 300.000   |
|  | 1.15.3. Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara | OJP         | 200.000   |
|  | 1.15.4. Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat                                      | OK          | 200.000   |
|  | 1.15.5. Honorarium Petugas Pengamat Kelas/Notulis   | OJ          | 100.000   |
|  | 1.15.6. Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat                             | OJ          | 200.000   |
|  | 1.15.7. Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking  | OK          | 500.000   |
|  | 1.15.8. Honorarium Fasilitator Benchmarking   | OK          | 1.500.000 |
|  | 1.15.9. Honorarium Petugas Keamanan   | OH          | 75.000    |
|  | 1.15.10. Honorarium Petugas Kebersihan  | OH          | 60.000    |
|  | 1.15.11. Honorarium Petugas Kesehatan/Tenaga Medis  | OH          | 75.000    |
|  | 1.15.12. Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Diklat                                      |             |           |
|  | a. Ketua  | OK          | 1.000.000 |
|  | b. Sekretaris   | OK          | 750.000   |
|  | c. Anggota  | OK          | 500.000   |
|  | 1.15.13. Honorarium Penyusunan Modul Diklat   | Materi      | 5.000.000 |
|  | 1.15.14. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat   |             |           |
|  | a. Lama Diklat s.d. 5 hari  |             |           |
|  | 1) Penanggung jawab   | OK          | 450.000   |
|  | 2) Ketua  | OK          | 375.000   |
|  | 3) Wakil Ketua  | OK          | 350.000   |



|         |   |            |           |
|---------|---|------------|-----------|
|         | 4) Sekretaris   | OK         | 325.000   |
|         | 5) Anggota  | OK         | 300.000   |
|         |   |            |           |
|         | b. Lama Diklat 6 hari s.d. 30 hari                              |            |           |
|         | 1) Penanggung jawab   | OK         | 600.000   |
|         | 2) Ketua  | OK         | 550.000   |
|         | 3) Wakil Ketua  | OK         | 450.000   |
|         | 4) Sekretaris   | OK         | 400.000   |
|         | 5) Anggota  | OK         | 350.000   |
|         |   |            |           |
|         | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari                               |            |           |
|         | 1) Penanggung jawab   | OK         | 800.000   |
|         | 2) Ketua  | OK         | 700.000   |
|         | 3) Wakil Ketua  | OK         | 625.000   |
|         | 4) Sekretaris   | OK         | 550.000   |
|         | 5) Anggota  | OK         | 500.000   |
|         |   |            |           |
| 1.16    | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH                       |            |           |
| 1.16.1. | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                       |            |           |
|         | a. Pembina  | OB         | 3.500.000 |
|         | b. Pengarah   | OB         | 3.000.000 |
|         | c. Ketua  | OB         | 2.500.000 |
|         | d. Wakil Ketua  | OB         | 2.000.000 |
|         | e. Sekretaris   | OB         | 1.500.000 |
|         | f. Anggota  | OB         | 1.300.000 |
| 1.16.2  | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah           |            |           |
|         | a. Ketua  | OB         | 1.000.000 |
|         | b. Sekretaris   | OB         | 900.000   |
|         | c. Anggota  | OB         | 600.000   |
|         |   |            |           |
| 1.17    | HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI DPA/DPPA SKPD             |            |           |
|         | a. Pembina  | Organisasi | 325.000   |
|         | b. Penanggung jawab   | Organisasi | 300.000   |
|         | c. Koordinator  | Organisasi | 290.000   |
|         | d. Ketua  | Organisasi | 280.000   |
|         | e. Sekretaris   | Organisasi | 270.000   |
|         | f. Anggota  | Organisasi | 260.000   |
|         |   |            |           |
| 1.18    | HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RKA/RKAP SKPD             |            |           |
|         | a. Koordinator  | Organisasi | 250.000   |
|         | b. Ketua  | Organisasi | 230.000   |
|         | c. Sekretaris   | Organisasi | 210.000   |
|         | d. Anggota  | Organisasi | 200.000   |
|         |   |            |           |
| 1.19    | HONORARIUM TIM REVU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH |            |           |
|         | a. Koordinator  | Organisasi | 225.000   |
|         | b. Ketua  | Organisasi | 200.000   |
|         | c. Sekretaris   | Organisasi | 175.000   |
|         | d. Anggota  | Organisasi | 150.000   |
|         |   |            |           |
| 1.20    | HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RENJA SKPD                |            |           |
|         | a. Koordinator  | Organisasi | 200.000   |
|         | b. Ketua  | Organisasi | 175.000   |
|         | c. Sekretaris   | Organisasi | 150.000   |
|         | d. Anggota  | Organisasi | 125.000   |
|         |   |            |           |
| 1.21    | HONORARIUM TIM PENGKAJI PERATURAN DAERAH                        |            |           |
|         | a. Penanggung jawab   | OK         | 300.000   |
|         | b. Koordinator  | OK         | 270.000   |
|         | c. Ketua  | OK         | 230.000   |

|        |  |        |           |
|--------|--|--------|-----------|
|        | d. Sekretaris  | OK     | 200.000   |
|        | e. Anggota   | OK     | 170.000   |
|        |  |        |           |
| 1.22   | HONORARIUM TIM PENGKAJIAN PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI      | OK     | 250.000   |
|        | a. Penanggungjawab   | OK     | 230.000   |
|        | b. Koordinator   | OK     | 210.000   |
|        | c. Ketua   | OK     | 190.000   |
|        | d. Sekretaris  | OK     | 160.000   |
|        | e. Anggota   |        |           |
|        |  |        |           |
| 1.23   | HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI                   |        |           |
| 1.23.1 | PENGELOLA SIPD TINGKAT KABUPATEN                                 | OB     | 1.500.000 |
|        | a. Administrator Daerah  | OB     | 1.250.000 |
|        | b. Administrator TAPD  | OB     | 750.000   |
|        | c. Operator Daerah   |        |           |
| 1.23.2 | PENGELOLA SIPD DILINGKUNGAN OPD/SKPD                             | OB     | 600.000   |
|        | a. Administrator   | OB     | 400.000   |
|        | b. Operator  |        |           |
| 1.23.3 | PENGELOLA APLIKASI LAIN SELAIN SIPD DAN APLIKASI SEJENIS LAINNYA |        |           |
|        | a. Administrator   | OB     | 750.000   |
|        | b. Operator  | OB     | 500.000   |
|        |  |        |           |
| 1.24   | HONORARIUM INSTRUKTUR  |        |           |
|        | a. Instruktur PNS  | OJ/OJP | 250.000   |
|        | b. Instruktur Non PNS  | OJ/OJP | 200.000   |
|        |  |        |           |
| 1.25   | HONORARIUM TENAGA AHLI DENGAN PERJANJIAN KERJA                   |        |           |
|        | a. Sarjana (DIV/S1)  |        | 2.750.000 |
|        | b. Master (S2)   | OB     | 3.200.000 |
|        | c. Doktor (S3)   | OB     | 3.750.000 |
|        |  |        |           |
| 1.26   | HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP                                   |        |           |
| 1.26.1 | SD (SEDERAJAT)   |        |           |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                                | OB     | 1.000.000 |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                                | OB     | 1.100.000 |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                                | OB     | 1.200.000 |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                                | OB     | 1.300.000 |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                               | OB     | 1.400.000 |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                              | OB     | 1.500.000 |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                              | OB     | 1.600.000 |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                                    | OB     | 1.700.000 |
| 1.26.2 | SLTP (SEDERAJAT)   |        |           |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                                | OB     | 1.100.000 |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                                | OB     | 1.200.000 |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                                | OB     | 1.300.000 |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                                | OB     | 1.400.000 |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                               | OB     | 1.500.000 |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                              | OB     | 1.600.000 |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                              | OB     | 1.700.000 |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                                    | OB     | 1.800.000 |
| 1.26.3 | SLTA (SEDERAJAT)   |        |           |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                                | OB     | 1.200.000 |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                                | OB     | 1.300.000 |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                                | OB     | 1.400.000 |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                                | OB     | 1.500.000 |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                               | OB     | 1.600.000 |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                              | OB     | 1.700.000 |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                              | OB     | 1.800.000 |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                                    | OB     | 1.900.000 |



|        |   |                      |            |
|--------|---|----------------------|------------|
| 1.26.4 | SARJANA MUDA (DI)                                       |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 1.300.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 1.400.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 1.500.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 1.600.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 1.700.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 1.800.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 1.900.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 2.000.000  |
| 1.26.5 | SARJANA MUDA (DII)                                      |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 1.400.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 1.500.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 1.600.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 1.700.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 1.800.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 1.900.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 2.000.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 2.100.000  |
| 1.26.6 | SARJANA MUDA (DIII)                                     |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 1.500.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 1.600.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 1.700.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 1.800.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 1.900.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 2.000.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 2.100.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 2.200.000  |
| 1.26.7 | SARJANA (SI) DAN/ATAU DIPLOMA IV (DIV)                  |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 1.600.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 1.700.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 1.800.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 1.900.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 2.000.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 2.100.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 2.200.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 2.300.000  |
| 1.26.8 | STRATA 2 (S2)   |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 1.700.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 1.800.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 1.900.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 2.000.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 2.100.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 2.200.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 2.300.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 2.400.000  |
| 1.26.9 | STRATA 3 (S3)   |                      |            |
|        | a. Masa Kerja 0 Tahun S/D 2 Tahun                       | OB                   | 3.750.000  |
|        | b. Masa Kerja 3 Tahun S/D 4 Tahun                       | OB                   | 3.850.000  |
|        | c. Masa Kerja 5 Tahun S/D 6 Tahun                       | OB                   | 3.950.000  |
|        | d. Masa Kerja 7 Tahun S/D 8 Tahun                       | OB                   | 4.050.000  |
|        | e. Masa Kerja 9 Tahun S/D 10 Tahun                      | OB                   | 4.150.000  |
|        | f. Masa Kerja 11 Tahun S/D 12 Tahun                     | OB                   | 4.250.000  |
|        | g. Masa Kerja 13 Tahun S/D 14 Tahun                     | OB                   | 4.350.000  |
|        | h. Masa Kerja 15 Tahun keatas                           | OB                   | 4.450.000  |
| 1.27   | SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN / STRUKTURAL           |                      |            |
| 1.27.1 | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) | Peserta/<br>angkatan | 75.000.000 |
| 1.27.2 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)              |                      |            |
|        | a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat | Peserta/<br>angkatan | 45.000.000 |

|          |   |                      |            |
|----------|---|----------------------|------------|
|          | b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat | Peserta/<br>angkatan | 55.000.000 |
| 1.27.3   | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)   |                      |            |
|          | a. Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat                                 | Peserta/<br>angkatan | 35.000.000 |
|          | b. Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat | Peserta/<br>angkatan | 45.000.000 |
| 1.28     | SATUAN BIAYA DIKLAT LEMHANAS  | Peserta/<br>angkatan | 95.000.000 |
| 1.29     | SATUAN BIAYA DIKLAT CALON CAMAT   | Peserta/<br>angkatan | 60.000.000 |
| 1.30     | SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN DAN PELATIHAN DASAR CPNS                                 |                      |            |
| 1.30.1   | SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CPNS   |                      |            |
|          | a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang                                      | Peserta/<br>angkatan | 2.242.000  |
|          | b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat                                   | Peserta/<br>angkatan | 2.742.000  |
| 1.30.2   | SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS   |                      |            |
|          | a. Diselenggarakan di BKDPSDM Kabupaten Bengkayang                                      | Peserta/<br>angkatan | 9.296.000  |
|          | b. Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat                                   | Peserta/<br>angkatan | 10.296.000 |
| 1.31     | BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI                                   |                      |            |
| 1.31.1   | Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata I                                      |                      |            |
| 1.31.1.1 | Biaya Hidup dan Biaya Operasional   |                      |            |
|          | a. Diploma I, Diploma II dan Diploma III  | OT                   | 16.070.000 |
|          | b. Diploma IV dan Strata I  | OT                   | 17.010.000 |
| 1.31.1.2 | Uang Buku dan Referensi   |                      |            |
|          | a. Diploma I, Diploma II dan Diploma III  | OT                   | 1.590.000  |
|          | b. Diploma IV dan Strata I  | OT                   | 1.850.000  |
| 1.31.2   | Program Strata 2/Spesialis 1 dan Strata 3/Spesialis 2                                   |                      |            |
| 1.31.2.1 | Biaya Hidup dan Biaya Operasional   |                      |            |
|          | a. Strata 2/Spesialis 1   | OT                   | 20.690.000 |
|          | b. Strata 3/Spesialis 2   | OT                   | 21.320.000 |
| 1.31.2.2 | Uang Buku dan Referensi   |                      |            |
|          | a. Strata 2/Spesialis 1   | OT                   | 2.120.000  |
|          | b. Strata 3/Spesialis 2   | OT                   | 2.380.000  |
| 1.32     | BANTUAN IZIN BELAJAR  |                      |            |
| 1.32.1   | Program Studi Diploma III   | OP                   | 2.000.000  |
| 1.32.2   | Program Studi Diploma IV dan Strata I   | OP                   | 3.000.000  |
| 1.32.3   | Program Studi Strata 2  | OP                   | 4.500.000  |
| 1.33     | SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR   |                      |            |
| 1.33.1   | LEMBUR DILUAR JAM KERJA   |                      |            |
|          | a. Golongan IV  | OJ                   | 25.000     |
|          | b. Golongan III   | OJ                   | 20.000     |
|          | c. Golongan II dan Golongan I   | OJ                   | 15.000     |
|          | d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap  | OJ                   | 12.000     |
| 1.33.2   | LEMBUR DILUAR HARI KERJA  |                      |            |
|          | a. Golongan IV  | OJ                   | 33.500     |
|          | b. Golongan III   | OJ                   | 27.500     |
|          | c. Golongan II dan Golongan I   | OJ                   | 22.500     |
|          | d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap  | OJ                   | 16.500     |
| 1.33.3   | UANG MAKAN LEMBUR   |                      |            |
|          | a. Golongan IV  | OH                   | 41.000     |



|      |  |    |           |
|------|--|----|-----------|
|      | b. Golongan III                                  | OH | 37.000    |
|      | c. Golongan II dan Golongan I                    | OH | 35.000    |
|      | d. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap           | OH | 31.000    |
| 1.34 | SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN                   |    |           |
|      | a. Makan   | OK | 35.000    |
|      | b. Snack   | OK | 12.500    |
|      | c. Makan (Prasmanan)                             | OK | 80.000    |
|      | d. Makan Setingkat Kepala Daerah                 | OK | 110.000   |
|      | e. Snack Setingkat Kepala Daerah                 | OK | 49.000    |
| 1.35 | HONORARIUM PENGELOLA ARSIP                       | OB | 300.000   |
| 1.36 | HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH |    |           |
|      | HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH         |    |           |
|      | a. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD I            | OB | 2.500.000 |
|      | b. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD II           | OB | 2.200.000 |
|      | c. Pengelola Barang Milik Daerah                 | OB | 2.000.000 |
|      | d. Pejabat Penatausahaan Barang                  | OB | 1.800.000 |
|      | e. Pengurus Barang Pengelola                     | OB | 1.500.000 |
|      | f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola            | OB | 1.000.000 |

### 1.37. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TABEL 1.37  
HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

| No | Nilai aset tetap         | Pengguna barang | Kuasa pengguna barang | Pejabat penatausahaan pengguna barang | Pengurus barang pengguna | Pembantu pengurus barang pengguna | Pengurus barang pembantu |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | 0 - 100 juta             | 420.000         | 370.000               | 320.000                               | 270.000                  | 220.000                           | 170.000                  |
| 2  | > 100 juta - 250 juta    | 470.000         | 420.000               | 370.000                               | 320.000                  | 270.000                           | 220.000                  |
| 3  | > 250 juta - 500 juta    | 520.000         | 470.000               | 420.000                               | 370.000                  | 320.000                           | 270.000                  |
| 4  | > 500 juta - 1 Miliar    | 570.000         | 520.000               | 470.000                               | 420.000                  | 370.000                           | 320.000                  |
| 5  | > 1 Miliar - 2,5 Miliar  | 620.000         | 570.000               | 520.000                               | 470.000                  | 420.000                           | 370.000                  |
| 6  | > 2,5 Miliar - 5 Miliar  | 670.000         | 620.000               | 570.000                               | 520.000                  | 470.000                           | 420.000                  |
| 7  | > 5 Miliar - 10 Miliar   | 720.000         | 670.000               | 620.000                               | 570.000                  | 520.000                           | 470.000                  |
| 8  | > 10 Miliar - 50 Miliar  | 770.000         | 720.000               | 670.000                               | 620.000                  | 570.000                           | 520.000                  |
| 9  | > 50 Miliar - 100 Miliar | 820.000         | 770.000               | 720.000                               | 670.000                  | 620.000                           | 570.000                  |
| 10 | > 100 Miliar - Ke atas   | 870.000         | 820.000               | 770.000                               | 720.000                  | 670.000                           | 620.000                  |
|    | Satuan                   | OB              | OB                    | OB                                    | OB                       | OB                                | OB                       |